

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Jawa Barat

1. Geografis

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Jawa selain Provinsi Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Secara astronomi Provinsi Jawa Barat terletak pada 5°50' - 7°50' Lintang Selatan dan 104°48' - 108°48' Bujur Timur. Luas wilayah yang dimiliki Jawa Barat yaitu mencapai 35.377,76 km², terdapat 40 sungai yang mengalir Provinsi Jawa Barat. Provinsi ini juga memiliki waduk atau situ yang cukup banyak, yaitu 1.267 waduk atau situ dengan memiliki potensi air permukaan sebanyak 10.000 juta m³ sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, air minum, dan industri.

Provinsi Jawa Barat terletak di bagian selatan dan tengah pegunungan serta dataran rendah pada bagian utara. Jawa Barat memiliki kawasan hutan yang berfungsi sebagai hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi dengan proporsi yang mencapai 22,10% dari seluruh luas wilayah di Jawa Barat. Berdasarkan letak geografis pada Provinsi Jawa Barat untuk bagian timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, bagian barat berbatasan dengan Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta, bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, dan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Berikut ini merupakan peta dari Provinsi Jawa Barat secara geografis beserta batas-batas wilayahnya, yaitu sebagai berikut:



Sumber: Peta Jawa Barat dalam Jabarprov (15 April 2019)

Gambar 4. 1 Peta Provinsi Jawa Barat

2. Wilayah Administrasi Pemerintah

Pada akhir tahun 2015 wilayah administrasi di Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 18 wilayah kabupaten dan 9 wilayah kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang luas daratan pada masing-masing kabupaten/kota, yaitu: Bogor 2.710,62 km², Sukabumi 4.145,70 km², Cianjur 3.840,1662 km², Bandung 1.767,9662 km², Garut 3.074,0762 km², Tasikmalaya 2.551,1962 km², Ciamis 1.414,7162 km², Kuningan 1.110,5662 km², Cirebon 984,5262 km², Majalengka 1.204,2462 km², Sumedang 1.518,3362 km², Indramayu 2040,1162 km², Subang 1.893,9562 km², Purwakarta 825,7462 km², Karawang 1.652,2062 km², Bekasi 1.224,8862 km², Bandung Barat 1.305,7762 km², Pangandaran 1.010,0062 km², Kota Bogor 118,5062 km², Kota Sukabumi 48,2562 km², Kota Bandung 167,6762 km², Kota Cirebon 37,3662 km², Kota Bekasi 206,6162 km², Kota Depok 200,2962 km², Kota Cimahi 39,2762 km²,

Kota Tasikmalaya 171,6162 km², dan Kota Banjar 113, 49 km². Wilayah yang memiliki luas paling besar adalah Kabupaten Sukabumi yaitu sebesar 4.145,70 km².

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Barat

Kota/Kabupaten	Luas Wilayah (Km²)	Banyaknya Kecamatan
Bogor	2.710,62	40
Sukabumi	4.145,70	47
Cianjur	1.840,16	32
Bandung	1.767,96	31
Garut	3.074,07	42
Tasikmalaya	2.551,19	39
Ciamis	1.414,71	26
Kuningan	1.110,56	32
Cirebon	984,52	40
Majalengka	1.204,24	26
Sumedang	1.518,33	32
Indramayu	2.040,11	31
Subang	1.893,95	30
Purwakarta	825,74	17
Karawang	1.652,74	30
Bekasi	1.224,88	23
Bandung Barat	1.305,77	16
Pangandaran	1.010,00	10
Kota Bogor	118,50	6
Kota Sukabumi	48,25	7
Kota Bandung	167,67	30
Kota Cirebon	37,36	5
Kota Bekasi	206,61	12
Kota Depok	200,29	11
Kota Cimahi	39,27	3
Kota Tasikmalaya	171,61	10
Kota Banjar	113,49	4

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka 2018

3. Penduduk

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Jumlah penduduk di Jawa barat pada tahun 2017 sesuai dengan hasil sensus penduduk tahun 2010 diperkirakan sebanyak 48,03 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,54 persen. Terdiri dari laki-laki sebanyak 24,33 juta jiwa dan perempuan sebanyak 23,70 juta jiwa, sehingga angka sex ratio di Jawa Barat sebesar 102,67 maka dapat diartikan bahwa terdapat 102 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan.

Jika angka sex ratio dilihat menurut kabupaten/kota maka Kabupaten Cirebon yaitu sebesar 105,17 yang artinya bahwa terdapat 105 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Sedangkan yang sex ratio terendah di Kota Banjar yaitu sebesar 97,63 yang artinya bahwa terdapat 97 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan.

Luas wilayah yang dimiliki Provinsi Jawa Barat sebesar 35.377,76 km², sebagian besar dari wilayahnya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Sedangkan penduduk terbesar berada di Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk yang dimiliki sebanyak 5,71 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil di Jawa Barat adalah Kota Banjar yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 182 ribu penduduk. Kota Cimahi dan Kota Bandung menjadi daerah yang terpadat di Jawa Barat dengan tingkat kepadatan mencapai 15.307 km² dan 14.898 km².

Pada tabel 4.2 di bawah ini jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2017 mengalami peningkatan. Tahun 2016 jumlah penduduk di Jawa Barat

sebesar 47.379.390 ribu jiwa, sedangkan untuk tahun 2017 jumlah penduduk di Jawa Barat sebesar 48.037.827 ribu jiwa. Sehingga peningkatannya mencapai 658.437 ribu jiwa.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2016	24.011.260	23.368.130	47.379.390
2017	24.335.331	23.702.496	48.037.827

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka 2017 dan 2018

B. Gambaran Umum Variabel Penelitian

1. Kemiskinan

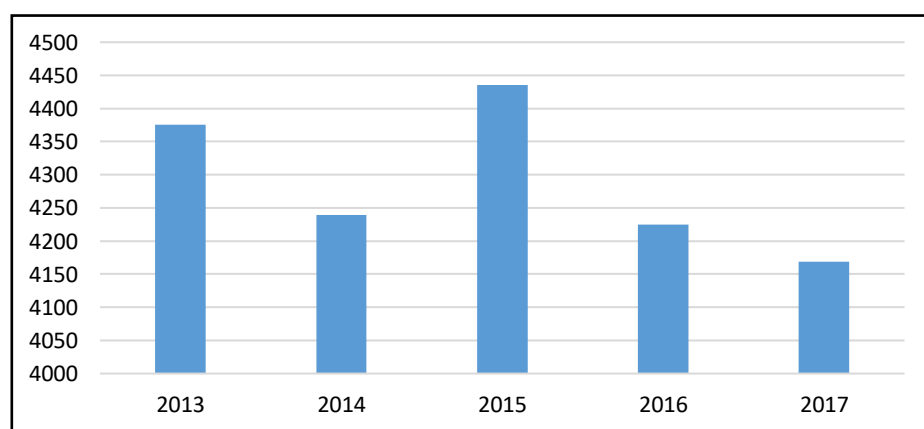
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasar standar yang meliputi kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan. Penduduk miskin dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu, absolute dan relatif. Kemiskinan absolute (*absolute proverty*) biasanya disebut sebagai kemiskinan yang sangat serius atau *extreme proverty*, yaitu kemiskinan yang terjadi pada seseorang saat mengalami kekurangan adanya sandang, pangan, dan papan. Sedangkan untuk kemiskinan relative adalah kemiskinan yang terjadi pada konteks sosial maupun lingkungan, karenan membanding pendapatan dari satau kelompok ke kelompok lain, sehingga akan mengalami adanya perbedaan.

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2013	4.375,17	9,61
2014	4.238,96	9,18
2015	4.435,70	9,53
2016	4.224,32	8,95
2017	4.168,44	7,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2018

Terjadi fluktuasi dalam perkembangan tingkat kemiskinan selama lima tahun terakhir di Provinsi Jawa Barat, distribusi penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa pola tidak merata, hal ini dapat dilihat dengan adanya jumlah penduduk miskin beserta persentasinya yang bervariasi. Pada tabel 4.3 di atas dan gambar 4.2 di bawah ini menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat yaitu tahun 2015 sebesar 4.435,70 ribu jiwa dari persentase penduduk miskin yang dimiliki sebesar 9,53 persen, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4.168,44 ribu jiwa dari persentase penduduk miskin sebesar 7,83 persen. Dari keseluruhan jumlah penduduk miskin pada tahun 2013-2017 yaitu sebesar 21.442,59 ribu jiwa. Pada tahun 2017 kemiskinan di Jawa Barat mencapai 7,83 persen dibandingkan dengan kemiskinan nasional yaitu sebesar 10,12 persen. Dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Barat mampu mengurangi permasalahan kemiskinan, karena persentase kemiskinan yang dimiliki Provinsi Jawa Barat di bawah rata-rata



kemiskinan nasional.

Gambar 4. 2 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2017

Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan di Provinsi Jawa Barat cukup heterogen, perbedaan dari kualitas infrastruktur fisik terutama dalam hal kesehatan, pendidikan, layanan-layanan masyarakat lainnya dan infrastruktur ekonomi seperti pasar, baik dilihat melalui sisi ketersediaan hingga kemudahan dalam aksesnya, hal ini menjadi sebagai tolak ukur dan menjadikan penjelasan adanya kualitas kesejahteraan masyarakat yang cukup kentara.

2. Produk Domestik Regional bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB merupakan jumlah nilai tambah dari hasil seluruh unit usaha untuk suatu daerah tertentu, atau dapat dijelaskan sebagai jumlah unit barang serta jasa akhir yang dihasilkan dari seluruh unit ekonomi suatu daerah. Menurut Bank Indonesia dalam metadata untuk menghitung PDRB terdapat tiga macam cara, yaitu dengan pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan distribusi.

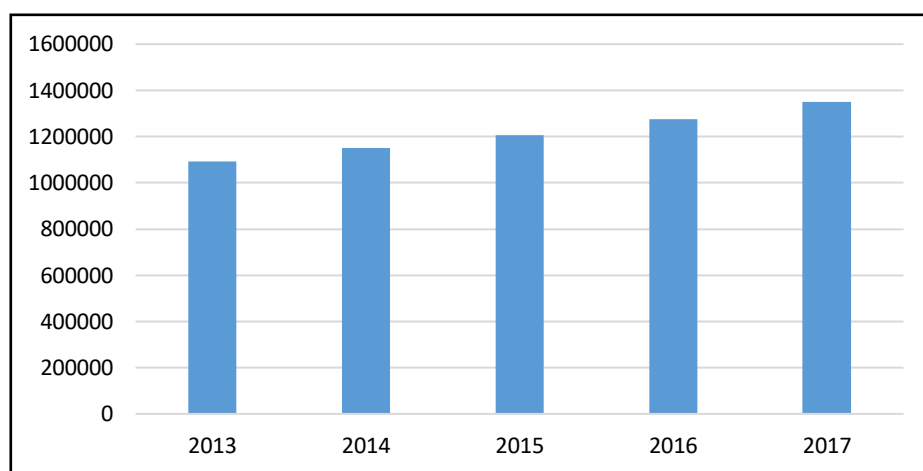
Tabel 4. 4 PDRB di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)
2013	1.093.543,55	6,33
2014	1.149.216,06	5,09
2015	1.207.083,41	5,04
2016	1.275.546,48	5,67
2017	1.350.826,11	5,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2018

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dan gambar 4.3 di bawah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Provinsi Jawa Barat pada setiap tahunnya

mengalami kenaikan. PDRB terendah di Jawa Barat yaitu tahun 2013 sebesar 1.093.543,55 juta rupiah dari laju pertumbuhan 6,33 persen, sedangkan untuk PDRB tertinggi di Jawa Barat yaitu tahun 2017 sebesar 1.350.826,11 juta rupiah. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat termasuk tinggi yaitu sebesar 5,35 persen dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5,07 persen.



Gambar 4. 3 PDRB di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

Pada kurun waktu 2015 sampai 2017, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah di Provinsi Jawa Barat mempunyai keinginan untuk terus mempertahankan serta meningkatkan kualitas dari kebijakan tersebut supaya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan 2017 tetap berada di atas nasional. Adapun kebijakan yang dimaksud yaitu: (1) mempertahankan pertumbuhan lapangan usaha dalam sektor pertanian dan industri pengolahan, (2) mengukuhkan pertumbuhan lapangan usaha dalam sektor perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa-jasa dan lapangan usaha konstruksi, (3) integrasi janji dari gubernur dengan implementasi program serta kegiatan dalam prioritas

pembangunan, dan (4) penguatan dalam kelembagaan investasi serta keuangan daerah.

3. Pendidikan

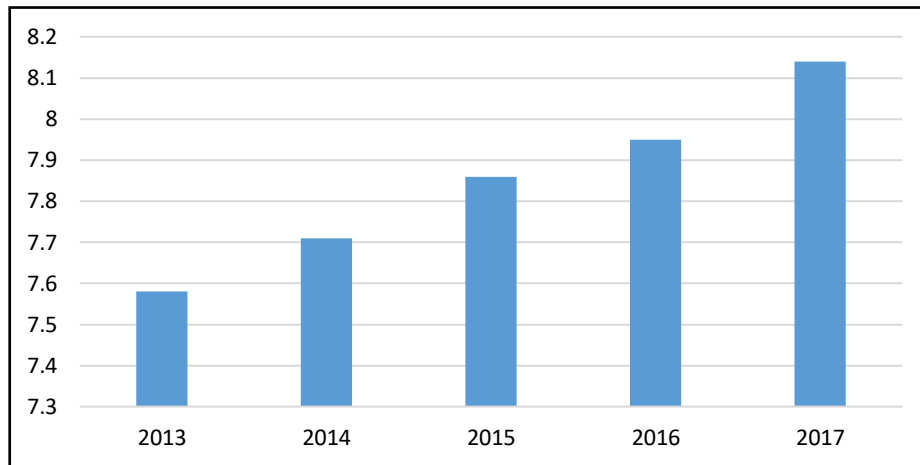
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan, pendidikan adalah suatu usaha terencana dalam mewujudkan suasana belajar serta proses belajar agar peserta didik tersebut dalam mengembangkan potensi dirinya memiliki kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri, kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan berbagai keterampilan lainnya yang dibutuhkan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Prasetyo, 2010).

Tabel 4. 5 Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
2013	7,58
2014	7,71
2015	7,86
2016	7,95
2017	8,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2017

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dan gambar 4.4 di bawah ini menunjukkan bahwa indikator pendidikan diukur menggunakan rata-rata lama sekolah pada setiap tahunnya terus meningkat. Rata-rata lama sekolah terendah di Jawa Barat yaitu tahun 2013 sebesar 7,58, sedangkan rata-rata lama sekolah tertinggi di Jawa Barat yaitu tahun 2017 sebesar 8,14.



Gambar 4. 4 Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan angka putus sekolah, namun ada beberapa faktor lain seperti faktor kelayakan sarana dan prasarana sekolah serta fasilitas belajar. Beberapa kecamatan untuk layanan pendidikan yang berkualitas dan baik masih sangat jauh seperti yang diharapkan serta masih banyaknya prasarana gedung yang mengalami kerusakan. Apabila semakin tinggi jenjang pendidikan maka akan semakin tinggi juga rata-rata lama sekolah, sehingga akan berdampak pada pola pikir dan kualitas individu. Jika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka tingkat produktivitas juga tinggi.

4. Belanja Daerah

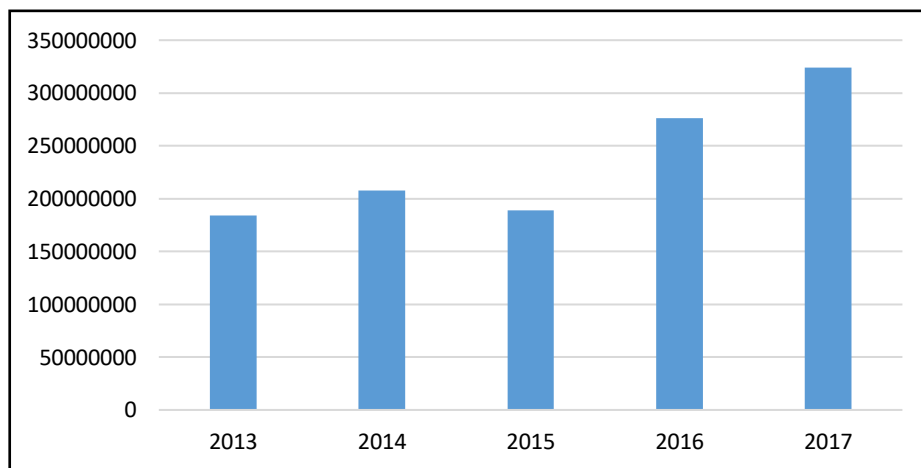
Belanja daerah di Provinsi Jawa Barat dibagi menjadi dua, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Tabel 4. 6 Belanja Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

Tahun	Belanja Daerah (Miliar Rupiah)	Persentase Belanja Daerah (%)
2013	18.396.745.323	82,97
2014	20.797.988.415	80,60
2015	18.863.852.665	66,50
2016	27.621.904.467	88,13
2017	32.429.026.042	99,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2017

Belanja daerah di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi pada tahun 2013 hingga tahun 2017. Dapat dilihat pada tabel 4.6 di atas dan gambar 4.5 di bawah, pertumbuhan belanja daerah di Jawa Barat yang terendah yaitu tahun 2013 sebesar 18.396.745.323 miliar rupiah dari persentase yang mencapai 82,97 persen. Sedangkan belanja daerah di Jawa Barat yang tertinggi pada tahun 2017 yaitu 32.429.026.042 miliar rupiah dari persentase yang mencapai 99,05 persen.



Gambar 4. 5 Belanja Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

5. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bertujuan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) serta pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka

membantu untuk kemandirian pemerintah daerah guna menjalankan fungsi serta tugasnya untuk melayani masyarakat. Dana lokasi umum merupakan salah satu dari dana perimbangan, yaitu dana yang sumbernya berasal dari APBN sehingga dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah tersebut dalam rangka adanya pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 112/PMK.07/2017 tentang perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari dana transfer umum (DBH dan DAU) kepada Menteri Keuangan.

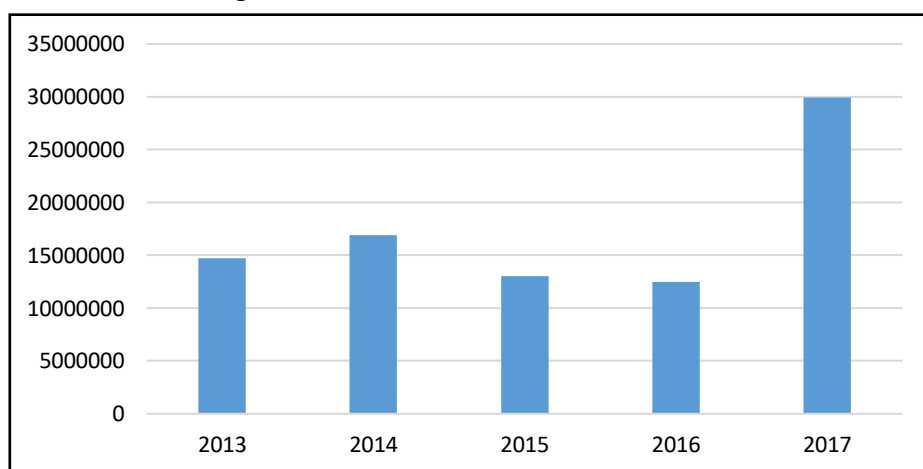
Transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum setelah dikurangi Alokasi Dana Desa dialokasikan untuk belanja infrastruktur daerah. Dana transfer umum (DBH dan DAU) diarahkan penggunaannya, yaitu sekurang-kurangnya 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Tabel 4. 7 Dana Alokasi Umum di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

Tahun	Dana Alokasi Umum (Rupiah)	Persentase Dana Alokasi Umum (%)
2013	1.472.453.011	6,64
2014	1.687.686.386	6,54
2015	1.303.654.355	4,60
2016	1.248.112.171	3,98
2017	2.992.041.500	9,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2017

Pada tabel 4.7 di atas dan gambar 4.6 di bawah ini mengalami fluktuasi dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Dana alokasi umum di Jawa Barat yang terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 1.248.112.171 miliar rupiah dari persentase yang mencapai 3,98 persen, sedangkan dana alokasi umum di Jawa Barat yang tertinggi yaitu tahun 2017 sebesar 2.992.041.500 miliar rupiah dari persentase sebesar 9,14 persen.



Gambar 4. 6 Dana Alokasi Umum di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017